

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk salah satu Negara yang sedang berkembang. Biasanya Negara yang sedang berkembang sangat gencar-gencarnya untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor, diantaranya adalah sektor ekonomi, sektor politik, dan sektor sosia budaya. Pembangunan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk mengembangkan perekonomian di Indonesia sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat mengantarkan Negara-negara yang sedang berkembang untuk memasuki tahap modernisasi.

Pembangunan ekonomi akan berhasil bila telah menggunakan sumber daya yang ada secara optimal. Karena pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam jangka panjang, maka penggunaan penggunaan sumber daya secara optimal harus pula memperhitungkan dinamika, baik jumlah maupun mutu sumber daya yang ada. Komposisi sumber daya juga akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi dan mekanismenya.

Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Selain memberikan dampak positif, pembangunan juga memberikan dampak yang negatif seperti masalah kemiskinan, kesempatan kerja dan tenaga kerja. Hal ini menjadi masalah

yang sangat serius bagi Negara Indonesia. Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan persaingan dalam mencari pekerjaan, sedangkan penawaran kesempatan kerja sangat terbatas. Hal ini akan menambah angka pengangguran. Persaingan dalam dunia kerja yang sangat kompetitif ini diakibatkan karena semakin banyak orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Membuka usaha ataupun berwirausaha merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan di atas. Misalnya, berdagang merupakan wirausaha dan juga dapat membuka peluang lapangan pekerjaan.

Di Negara sedang berkembang, 30% sampai 70% populasi tenaga kerja di kota bekerja di sektor informal. Karena sektor informal ini sangat diminati oleh pekerja yang datang dari pedesaan. Sektor informal biasanya terjadi pada unit usaha kecil dan tentunya modal yang dikeluarkan juga kecil, namun dengan modal maupun usaha yang kecil ini tidak membuat sektor informal menjadi menurun dan justru setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun contoh dari sektor informal itu sendiri seperti: pedagang kaki lima, pedagang kelontong, pedagang di pasar-pasar tradisional, dan lain-lain. Peran sektor informal yang positif sangat diperlukan dalam pembangunan.

Arus urbanisasi merupakan salah satu faktor penyebab permasalahan diperkotaan, utamanya mengenai kedatangan kaum urban yang gagal dalam kualifikasi pekerjaan, dimana kebanyakan pendatang dari desa tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memperoleh pekerjaan di kota, mereka kalah bersaing dengan orang-orang yang memiliki modal,

pendidikan, pengalaman, *skill* (ketrampilan), informasi dan akses yang lebih baik sehingga kedatangan kaum urban ini menjadikan kota kelebihan angkatan kerja.

Bagi kelompok ini pokok persoalan kemiskinan disebabkan ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer sehingga timbul permasalahan sosial. Kemiskinan dalam masyarakat kota, menjadi problem sosial yang disebabkan kedudukan ekonomi masyarakat dapat ditentukan secara tegas. Kesenjangan antara kaya dan miskin terpampang secara nyata. Hal ini demikian berbeda dengan kemiskinan di pedesaan, dimana kemiskinan bukan masalah sosial karena ada anggapan semua telah ditakdirkan. Mereka tidak terlalu memperhatikan hal tersebut kecuali mereka benar-benar menderita karenanya. Adapun faktor yang menyebabkan mereka membenci kemiskinan adalah kesadaran bahwa mereka telah gagal untuk memperoleh lebih dari apa yang telah dimilikinya, sehingga mereka berupaya dengan pengharapan kondisi kehidupannya akan lebih baik (Soerjono Soekanto, 1990:407).

Menurut Hidayat (1983), sektor informal di artikan sebagai unit usaha bersekala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kerja dan pendapatan bagi dirinya sendiri, dimana dalam usahanya itu sangat dibatasi oleh modal dan ketrampilan.

Dalam sejarah perekonomian Indonesia, kegiatan usaha sektor informal sangat potensial dan berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan penyerapan tenaga kerja secara mandiri. Pedagang sektor informal adalah orang yang bermodal relative sedikit berusaha dibidang produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat. Usaha-usaha tersebut dilaksanakan di tempat yang strategis dalam suasana yang informal (Winardi, 2000).

Menurut Todaro (1998) karakteristik sektor informal adalah sangat bervariasi dalam dalam kegiatan produksi barang dan jasa bersekala kecil, unit usaha yang dimiliki secara perorangan atau kelompok, banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya), dan teknologi yang dipakai sangat sederhana. Para pekerjanya sendiri tidak memiliki pendidikan formal, umumnya tidak mempunyai ketrampilan dan modal kerja. Oleh sebab itu produktivitas dan pendapatan mereka cenderung rendah dibandingkan dengan kegiatan bisnis yang dilakukan di sektor formal. Pendapatan tenaga kerja informal bukan berupa upah yang diterima tetap setiap bulannya, seperti halnya tenaga kerja formal. Upah pada sektor informal diinvestasikan melalui peraturan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Dalam kapitalisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Dalam konsep dasarnya pasar tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh pemerintah. Sosialisme berpandangan sebaliknya, yaitu peran pasar harus

ditiadakan. Sebagai gantinya maka pemerintah harus berperan aktif dalam menyelesaikan dan mengatur seluruh persoalan perekonomian. Pemerintah harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi sendiri seluruh kebijakan ekonomi. Islam sangat menghargai posisi pasar sebagai wahana alokasi dan distribusi sumberdaya ekonomi. Tetapi, dalam ajaran Islam pasar ditempatkan pada posisi yang proposional., berbeda dengan pandangan kapitalisme maupun sosialisme. Dalam Islam pasar memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Dengan kata lain, mekanisme pasar tidak harus ada investasi dan rekayasa apapun (*taken for granted*).

Berbicara tentang sektor pasar tentunya tidak lepas dari pedagang sebagai pelaku utamanya, yang kemudian salah satunya yaitu pedagang kaki lima (PKL). Pedagang kaki lima yaitu mereka yang berkerja dengan memanfaatkan situasi, tempat dan keramaian seperti trotoal dan tempat umum lainnya. Biasanya PKL banyak terdapat di daerah perkotaan, keberadaan PKL di perkotaan dapat menyediakan lapangan kerja baru. Banyak orang yang menjadikan pedagang kaki lima sebagai pilihan alternatif bagi tidak yang tertampung di sektor formal. Jadi keterlibatan dalam sektor informal lebih diakibatkan keterpaksaan saja dibandingkan sebagai pilihan, hal ini karena tekanan dari system ekonomi yang tidak memberi tempat bagi mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan ketrampilan yang mencukupi (Rachbini, D. J. and A. Hamid ,1994:57).

Kawasan di sepanjang pantai selatan di Kabupaten Bantul merupakan tempat rekreasi masyarakat yang pada umumnya bertujuan

untuk menikmati keindahan alam dan menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Pantai ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan masyarakat yang dilakukan pada umumnya adalah bersifat informal yaitu pedagang kaki lima yang melakukan usahanya pada lokasi pariwisata tersebut. Sebagian besar unit Pedagang Kaki Lima ini bergerak pada bidang kuliner, pakaian, cinderamata dan lain sebagainya.

Pembangunan di wilayah pesisir pantai tentunya akan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat sekitar pantai, baik kegiatan ekonomi yang bersifat informal maupun yang bersifat formal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan antara lain adalah modal, lama usaha, jam usaha, dan pendidikan. Untuk mengetahui pendapatan Pedagang Kaki Lima di sepanjang pantai selatan di Kabupaten Bantul, maka berdasarkan uraian yang sesuai pada latar belakang di atas, peneliti menggunakan judul : “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PEDAGANG KAKI LIMA SEPANJANG PANTAI SELATAN DI KABUPATEN BANTUL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh modal, lama usaha, pendidikan, jam kerja berpengaruh terhadap pendapatan pedagang kaki lima sepanjang pantai selatan di Kabupaten Bantul.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh modal, lama usaha, jam kerja, dan pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di sepanjang pantai selatan Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk membuat kebijakan pemerintah.

2. Bagi pelaku usaha

Dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam mengambil langkah kedepan sesuai kondisi yang ada mengenai usaha yang akan dijalani.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang pantai-pantai yang ada di Kabupaten Bantul yang belum diketahui dan dapat menerapkan ilmu yang sudah diperoleh dengan praktik langsung ke lapangan serta sebagai persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.